

CORPORATE GOVERNANCE DAN KETAATAN PENGUNGKAPAN WAJIB PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Abdul Kharis

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl.Jend.A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta, 57102.

Djoko Suhardjanto

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36 Surakarta, 57126

Abstract

The purpose of this study was to examine corporate governance and mandatory disclosures compliance of Indonesian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Under purposive sampling, secondary data of 48 annual reports year 2005–2010 of BUMN in Indonesian Stock Exchange were selected. The average level of mandatory disclosures compliance was at 54.99%. This number indicated that Indonesian's BUMN was not fully compliance to SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 and SE-02/BL/2008. In accordance with the purpose of the study, the result of multiple regression showed that corporate governance affected the level of mandatory disclosure compliance through the variable number of board and educational background of director. Other variables, such as board size, the composition of independent commissioner, audit committee size, the composition of independent audit committee members and number of audit committee meetings were not good predictors for level of mandatory disclosure compliance.

Key words: *corporate governance, mandatory disclosure compliance, board size, audit committee, commissioner of independent.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *corporate governance* dan ketaatan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan di Indonesia. *Corporate governance* dalam penelitian ini direpresentasikan dengan: ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris, ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, dan rapat komite audit.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Korespondensi dengan Penulis:

Abdul Kharis: Telp. +62 271 717 417; Fax. +62 271 715 448

E-mail: neverstop999@yahoo.com

Maraknya pemberitaan kasus BUMN bermasalah di Indonesia merupakan bukti lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Berita tentang *inefficiency* dan KKN sebagai *hidden enemy* pada BUMN masih menghiasi berbagai media massa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan indikasi korupsi sekitar Rp10,484 triliun di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 2004-2006 (tempointeraktif.com, 2007).

Penelitian mengenai *disclosure* dan *corporate governance* di luar negeri dilakukan oleh Chen & Jaggi (2000) yang menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *disclosure*. Penelitian Hossain, *et al.* (2006) menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen sebagai salah satu aspek penting *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Ettredge, *et al.* (2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *disclosure*.

Di Indonesia, penelitian *disclosure* dan *corporate governance* juga dilakukan, antara lain oleh Khomsiyah (2003) yang menunjukkan bahwa indeks *corporate governance* berhubungan positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib, sedangkan struktur CG tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Suhardjanto & Choiriyah (2010) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan, *leverage* berpengaruh negatif signifikan, dan latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Suhardjanto & Permatasari (2010) menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen, ukuran perusahaan, dan latar belakang etnik komisaris utama berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal, pertama fokus penelitian dilakukan pada BUMN karena mengelola usaha yang menguasai

hajat hidup orang banyak (Purwoko, 2002). Kedua, beberapa kasus yang terjadi di BUMN, seperti kasus dugaan korupsi, skandal manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan lemahnya praktik transparansi sebagai praktik penerapan *corporate governance* (Jubaedah, 2007). Melalui prinsip transparansi, BUMN dituntut untuk selalu terbuka di dalam melaksanakan proses pengelolaan usahanya dan mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Jubaedah, 2007).

HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
- H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
- H₃: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
- H₄: Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib.
- H₅: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
- H₆: Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
- H₇: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

METODE

Penelitian ini adalah pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, mema-

hami perbedaan antara kelompok atau independensi dua variabel atau lebih (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2005 sampai 2010. Tahun tersebut dipilih karena sesuai dengan isi dari *master plan* BUMN tahun 2005, salah satu intinya yaitu memperbaiki kinerja BUMN. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria BUMN non-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2010 dan BUMN non-keuangan yang menyediakan laporan tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diambil dari laporan tahunan perusahaan dari tahun 2005-2010 di www.idx.co.id dan situs perusahaannya.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Komisaris}} \times 100\%$$

Ukuran Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan adalah jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan (independen) sesuai dengan penelitian Dalton, *et al.* (1999), Nasution & Setiawan (2007), dan Abeysekera (2008).

Proporsi Komisaris Independen

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Suhardjanto & Afni (2009) dan Suhardjanto & Miranti (2009), yaitu:

$$\text{Proporsi LBPKD} = \frac{\sum \text{Komisaris Berlatar Belakang Pendidikan Eko/Bis}}{\sum \text{Komisaris}} \times 100\%$$

Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Cety & Suhardjato (2010) dan Ettredge,

et al. (2010), yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Kusumastuti, *et al.* (2007), yaitu:

$$\text{Proporsi Komite Audit Independen} = \frac{\sum \text{Komite Audit Independen}}{\sum \text{Komite Audit}} \times 100\%$$

Ukuran Komite Audit

Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota audit.

Proporsi Komite Audit Independen

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Suhardjanto & Permatasari (2010) dan Suhardjanto & Anggitarani (2010), yaitu:

Jumlah Rapat Komite Audit

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, *et al.* (2008) dan Ettredge, *et al.* (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Variabel Dependen

Penelitian ini mengacu pada peraturan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan No SE-02/BL/2008 dengan jumlah item pengungkapan sebanyak 43 item. Untuk teknik pengukuran menggunakan teknik *scoring*, jika item tersebut diungkapkan dalam *annual report* maka diberikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item tersebut tidak diungkapkan dalam *annual report*.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Persamaan regresi berganda

untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$PW = \alpha + \beta_1 BSIZE + \beta_2 PROP_KOMIND + \beta_3 RPTDEKOM + \beta_4 LBPKD + \beta_5 ACSIZE + \beta_6 PROP_KAIND + \beta_7 RPTKA + e$$

Keterangan:

- PW : pengungkapan wajib
- BSIZE : ukuran dewan komisaris (*board size*)
- PROP_KOMIND : proporsi komisaris independen
- RPTDEKOM : jumlah rapat dewan komisaris
- LBPKD : latar belakang pendidikan dewan komisaris
- ACSIZE : ukuran komite audit (*audit committee size*)
- PROP_KAIND : proporsi komite audit independen
- RPTKA : rapat komite audit
- α : konstanta
- β : koefisien regresi
- e : *error*

HASIL

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2005-2010 yang berjumlah 50 perusahaan. Dari 50 perusahaan 2 diantaranya tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga total sampelnya adalah 48 perusahaan BUMN.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Variabel	Mean	Min	Max	St. Deviasi
PW	54,99	37,21	79,07	7,67

Data tersebut menunjukkan bahwa rerata pengungkapan pos laba rugi di BUMN non-keuangan Tbk. masih rendah karena belum mencapai

100,00%, mengingat pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan wajib yang seharusnya memiliki tingkat pengungkapan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip *corporate governance* yang dijalankan oleh BUMN tersebut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel	Min	Max	Mean	St. Deviasi
BSIZE	2,00	6,00	4,94	0,81
PROP_KOMIND	20,00	66,67	42,53	9,88
RPTDEKOM	4,00	33,00	14,73	6,42
LBPKD	0,00	100,00	52,81	25,05
ACSIZE	3,00	7,00	4,10	1,29
PROP_KAIND	57,14	100,00	90,44	15,19
RPTKA	3,00	37,00	17,56	8,72

Berdasarkan hasil penelitian, rerata jumlah komisaris yang dimiliki BUMN di Indonesia sudah menaati Peraturan Pemerintah No.40/2007, yaitu perusahaan harus memiliki minimal dua komisaris. Menurut Muntoro (2006), ukuran dewan komisaris yang efektif dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi, jenis industri, risiko yang dihadapi, dan komite audit.

Berdasarkan peraturan keberadaan komisaris independen yang diatur Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku untuk menciptakan *corporate governance*.

Berdasarkan rerata rapat dewan komisaris menunjukkan bahwa perusahaan secara rutin melakukan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rerata rapat juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan rapat lebih dari 12 kali dalam satu tahun.

Rerata tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan

ekonomi/bisnis dimiliki oleh banyak perusahaan untuk menunjang usahanya di bidang bisnis/ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUMN lebih memilih dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/bisnis.

Dilihat dari rerata ukuran komite audit sebesar 4,102 sudah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam sehingga perusahaan yang memiliki ukuran komite audit yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengawasi pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern (Anderson, *et al.*, 2004).

Proporsi komite audit independen minimal sebesar 33% (Cety & Suhardjanto, 2010). Hasil penelitian menunjukkan jumlah rerata proporsi komite audit independen sebesar 90,44%. Tingginya rerata proporsi komite audit independen mengindikasikan bahwa kualitas kontrol oleh komite audit terhadap aktivitas perusahaan semakin baik (Forker, 1992).

Rerata rapat komite audit menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu sekali dalam sebulan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *R square* sebesar 0,277 dan *adjusted R square* sebesar 0,245. Berdasarkan nilai *adjusted R square* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 24,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebanyak 75,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 3 juga menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,618 dengan probabilitas 0,001 ($p - value < 0,050$). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,050 maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*). Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris ($\beta=0,487$ dan $p-value=0,003$) dan latar belakang pendidikan dewan komisaris ($\beta=0,081$ dan $p-value=0,046$) berpengaruh positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib, sedangkan ukuran komisaris ($\beta=0,027$ dan $p-value=0,836$), proporsi komisaris independen ($\alpha=-0,107$ dan $\beta-value$ sebesar 0,421), ukuran komite audit ($\alpha=0,139$ dan $p-value$ sebesar 0,307), proporsi komite audit independen ($\beta=-0,126$ dan $p-value = 0,335$), dan jumlah rapat komite audit ($\beta = 0,105$ dan $p-value = 0,429$) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

PEMBAHASAN

Konsisten dengan penelitian terdahulu bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris sebuah perusahaan akan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap proses pelaksanaan *corporate gov-*

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	T	<i>p-value</i>
(Constant)	0,279	5,128	0,000
RPT_DEKOM	0,487	3,164	0,003*
LBP_DEKOM	0,081	2,052	0,046*
BSIZE	0,027	0,208	0,836
PROP_IND	-0,107	-0,813	0,421
ACSIZE	0,139	1,033	0,307
PROP_KAI	-0,126	-0,975	0,335
RPT_KAI	0,105	0,798	0,429
<i>R Square</i>	0,277		
<i>Adjusted R Square</i>	0,245		
F	8,618		
Sig	0,001		

ernance sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan wajib dengan lebih baik, lengkap, dan informatif.

Menurut Muntoro (2006), proses rapat yang baik akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkatkan ketaatan pengungkapan wajib. Perusahaan Gas Negara (PT.PGN) dengan ketaatan pengungkapan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 79,070 melakukan rapat dewan komisaris sebanyak 29 kali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge, *et al.* (2010).

Latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Proporsi dewan komisaris yang memiliki anggota dengan latar belakang ekonomi dan bisnis lebih banyak cenderung lebih taat terhadap pengungkapan wajib yang diharuskan. Dewan komisaris yang memiliki latar pendidikan bisnis dan/atau ekonomi akan memiliki pengetahuan lebih banyak di bidang bisnis dan ekonomi sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis perusahaan (Kusumastuti, *et al.*, 2007).

Hasil regresi menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat ketaatan pengungkapan wajib pada BUMN non-keuangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 jumlah anggota komisaris ditetapkan oleh RUPS dan menteri sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berarti tidak ada ketentuan mengenai jumlah komisaris yang seharusnya dimiliki BUMN.

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal menarik dapat dilihat berkaitan dengan independensi, yaitu terdapat fenomena di Indonesia yang memberikan jabatan komisaris kepada seseorang bukan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme namun sebagai penghormatan atau penghargaan, sehingga dapat dikatakan pemilihan komisaris di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi (Surya & Yustianandana, 2006). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalton, *et al.* (1999), Ho & Wong (2001), Suhardjanto & Afni (2009), dan Suhardjanto & Miranti (2009).

Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal ini mungkin terjadi karena komite audit yang wajib dibentuk oleh dewan komisaris hanya bertujuan untuk memenuhi Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.29/PM/2004.

Proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membantu dewan komisaris, komite audit independen belum melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal tersebut mungkin disebabkan karena agenda rapat tidak melakukan *review* terhadap laporan keuangan, proses audit, dan internal kontrol perusahaan sesuai dengan fungsi komite audit (Klein, 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *corporate governance* dan ketaatan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) BUMN non-keuangan di Indonesia. Variabel independen (*corporate governance*) yang mempengaruhi tingkat ketaatan

Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara

Abdul Kharis & Djoko Suhardjanto

pengungkapan wajib berupa jumlah rapat dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris. Variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib.

Tingkat ketaatan pengungkapan wajib perusahaan BUMN di Indonesia dalam mengungkapkan informasi mengenai pos laba rugi ternyata masih rendah mengingat laporan laba rugi mencerminkan efektivitas operasi perusahaan dan dapat mendeteksi kelangsungan usaha dan merupakan salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sesuai dengan SE Bapepam No.2 Tahun 2002 dan 2008.

Saran

Diharapkan adanya peningkatan peran dewan komisaris dan komite audit sebagai komponen penting yang mendukung terlaksananya *corporate governance* agar dapat meningkatkan ketaatan pengungkapan wajib oleh BUMN di Indonesia.

Perlu diadakan sosialisasi lebih mendalam mengenai penerapan SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan SE-02/BL/2008 agar peraturan tersebut dapat diterapkan sepenuhnya oleh BUMN di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik item selain pos laba rugi sehingga dapat mengetahui dan membandingkan tingkat ketaatan pengungkapan wajib pada pos lain dalam *annual report*. Selain itu, juga bisa membandingkan tingkat pengungkapan wajib antara BUMN dan Non-BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. 2008. *The Role of Corporate Governance in Intellectual Capital Disclosure in Kenyan Listed Firms*. www.ssrn.com. (Diakses Tanggal 30 Agustus 2010).
- Anderson, R.C, Mansi, S.A., & Reeb, D.M. 2004. Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and The Cost of Debt. *Journal of Accounting and Economics*, 37: 315-342.
- Cety T. & Suhardjanto, D.2010. Pengaruh Corporate Governance terhadap Environmental Performance di Indonesia. *Call for Paper*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Chen, J.P. & Jaggi, B.L. 2000. The Association between Independent Non-executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4-5): 285-310.
- Dalton D., Daily C., Johnson J., & Ellstrad, A. 1999. Number of Director and Financial Performance: Meta Analysis. *Academy of Management Journal*, 42(6): 674-686.
- Ettredge, M., Johnstone, K., Stone, M., & Wang, Q. 2010. The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies*, Forthcoming.
- Forker, J. J. 1992. Corporate Governance and Disclosure Quality. *Accounting and Business Research*, Spring: 111-124.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia*. <http://muharieffendi.files.wordpress.com>. (Diakses Tanggal 21 November 2010).
- Ho, S.S.M. & Wong, K.S. 2001. A Study of Relationship between Corporate Governance Structure and Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, (10): 139-156.
- Hossain, M., Islam, K., & Andrew, J. 2006. *Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries; Evidence from Bangladesh*. Faculty of commerce papers, University of Wollongong. <http://ro.uow.edu.au/commpapers/179>. (Diakses tanggal 6 Agustus 2010).
- Jeanjean, T. & Stolowy, H. 2008. *Determinants of Board Members' Financial Expertise - Empirical Evidence from France*. <http://ssrn.com>. (Diakses Tanggal 21 November 2010).
- Jubaedah, E. 2007. Pengembangan *Good Corporate Governance* dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1): 45-55.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/X/X.K.1.pdf. (Diakses Tanggal 14 April 2011).

- Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 *Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara*. http://www.iicg.org/asset/doc/Kepmen_BUMN_2002_117_Praktek_GCG_BUMN.pdf. (Diakses Tanggal 15 April 2011).
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 *Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*. http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Regulation/ListingRegulation/id-ID/Peraturan_I-A_Gabung.pdf. (Diakses Tanggal 14 April 2011).
- Khomsiyah. 2003. Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Khomsiyah. 2005. Analisis Hubungan Struktur dan Indeks *Corporate Governance* dengan Kualitas Pengungkapan. *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Klein, A. 2006. Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. *Working Paper No. 06-42*. <http://www.ssrn.com>. (Diakses Tanggal 20 November 2011).
- Muntoro, R.K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Makalah*.
- Nasution, M. & Setiawan D. 2007. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 *Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*. <http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/1239586462.pdf>. (Diakses Tanggal 22 Desember 2011).
- Purwoko. 2002. Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 6(1): 1-21.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*. Forth Edition. John Wiley and Sons Inc.
- Suhardjanto, D. & Afni A. N. 2009. Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 8(3): 265-279.
- Suhardjanto, D. & Anggitarani, A. 2010. Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 2: 125-245.
- Suhardjanto, D. & Choiriyah, U. 2010. *Information Gap: Demand Supply Environmental Disclosure* di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 14(1): 36-51.
- Suhardjanto, D. & Miranti, L. 2009. Praktik Penerapan *Indonesian Reporting Index* dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 13(1): 63-77.
- Suhardjanto, D. & Permatasari, D.N. 2010. Pengaruh *Corporate Governance*, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap *Environmental Disclosure: Studi Empiris* pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. *KINERJA, Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14(02): 151-164.
- Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-02/PM/2002 *Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Surat Edaran Ketua Bapepam dengan Nomor: SE-02/BL/2008 *Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Tambang dan Migas*.
- Surya, I. & Yustiavandana, I. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Vafeas, N. 1999. Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economic*, 53: 113-142.